



Warna Bangunan Tak Boleh Mencolok

■ Malioboro Disesuaikan Konsep Aslinya

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah fasad dan bangunan di kawasan Malioboro akan disesuaikan dengan bangunan warisan budaya (*heritage*) yang ada. Selain itu, bangunan di kawasan tersebut tidak diperbolehkan terlalu tinggi dan terlalu mencolok warnanya.

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Sjamsinarsi menjelaskan, ada sejumlah fasad yang akan dikembalikan seperti bentuk semula dan ada yang dimodifikasi. Bangunan di kawasan Malioboro ini nantinya memang akan disesuaikan dengan konsep bangunan yang sesuai dengan sejarahnya.

"Nanti ada yang dimodifikasi atau dibangun senada. Contoh seperti kantor Bank Indonesia yang dibangun senada dengan Kantor Pos di dekat Titik Nol (Kl-

● ke halaman 19

Warna Bangunan

• Sambungan Hal 13

lometer)." ujar Rani, akhir pekan lalu.

Bangunan di kawasan Titik Nol Kilometer, kata dia, disesuaikan dengan beberapa bangunan cagar budaya yang ada. Di kawasan tersebut banyak bangunan peninggalan masa Hindia Belanda.

Sementara, di kawasan Malioboro juga ada beberapa unsur budaya dalam arsitekturnya. Di antaranya, adalah unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Namun, saat ini sejumlah fasad sudah dibangun dalam bentuk modern.

Konsep fasad dan bangunan ke depan, ujar Rani, tidak diperbolehkan dengan warna yang mencolok. Warna yang dimaksud nantinya adalah warna seragam yang memberikan kesan adem dan tenang.

Konsep warna ini, papar Rani, sudah dipelajari tim proyek revitalisasi. Hal ini dengan melihat contoh penataan bangunan di negara Jepang. "Di sana restoran cepat saji pun warnanya tidak mencolok. Adem dan tidak warna hijau, kuning, merah yang mencolok," ujar mantan Kepala Dinas PUP-ESDM DIY ini.

Selain pewarnaan yang ti-

dad mencolok, di bangunan gedung juga tidak ada kabel listrik. Selain itu juga dipercantik dengan pepohonan yang tidak terlalu tinggi.

Meski demikian, Rani belum bisa memastikan apakah penyamaan fasad dan bangunan ini sebagian akan dibiayai pemerintah. Jika memang dimungkinkan ada biaya dari pemerintah, bantuan mungkin tidak diberikan secara penuh lantaran bangunan bukan warisan budaya. "Apalagi pemilik bangunan di sana juga bukan masyarakat berpenghasilan rendah," ulasnya. Untuk pengaturan fasad ini, regulasi yang bisa digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Sumbu filosofis

Kepala Seksi Penataan bangunan dan Permukiman bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Arief Azazie Zein menjelaskan, penegasan Jalan Malioboro sebagai sumbu filosofis pun dilakukan dengan keberimbangan sisi jalan. Arief menyebutkan penegasan itu dilakukan dengan pedestrian di sisi barat dan timur, kemudian ada ruang untuk koridor, kemudian toko.

"Ada nanti kawasan bangunan yang dibentuk ko-

ridor. Namun, untuk bentuknya koridor dan fasad bangunan belum disentuh. Saat ini baru menyelesaikan pedestrian dan itu kewenangan Dinas Kebudayaan," ujarnya.

Penegasan sumbu filosofis ini tak lepas dari sisi sejarahnya. Jalan Malioboro yang memang ditata sebagai sumbu imajiner antara laut selatan (Pantai Parangsumo) - Keraton Yogyakarta - Gunung Merapi. Selain itu, sisi selatan Jalan Malioboro juga berperan penting sebagai saksi sejarah kemerdekaan Indonesia dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Untuk arsitektur bangunan, papar Arief, memang menjadi wewenang dinas terkait. Pasalnya, di kawasan Malioboro terdapat beberapa unsur budaya yang mempengaruhi bangunannya. Di antaranya, Malioboro memiliki bangunan dengan corak Jawa, seperti Kepatihan, Eropa seperti Istana Negara dan Benteng Vredenburg, serta kawasan Pecinan di Ketandan. "Malioboro punya sejarah, ke depan arsitekturnya bagaimana itu yang bisa menjawab adalah dinas terkait, kami fokus pada urban desainnya," jelasnya.

Selain beberapa hal teknis, vegetasi Malioboro pun tak lepas dari penataan ini. Pihaknya menanam dua ta-

naman khas sesuai dengan rekomendasi untuk mewakili Malioboro. Dua tanaman yang dipercaya sebagai bagian dari sejarah Malioboro adalah asem dan gayam.

Dua tanaman ini nantinya akan menghiasi pedestrian Malioboro dan menjadi peneduh bagi pelintasnya. Arief pun menyebut interval penanaman asem dan gayam pun diatur sedemikian rupa. Untuk gayam ditanam pada jarak 100 meter dan asem pada jarak 9 meter di total jalan sepanjang 2 kilometer ini.

Sementara, untuk mempercantik konsep pedestrian juga akan didukung dengan tanaman perdu yang diurutkan dari warna putih (melati) dari sebelum rel kereta api, kemudian menjadi tanaman berwarna kuning, oranye, merah, dan sampai Titik Nol Kilometer menjadi warna hijau (pandan). "Kami juga sudah mempercantik dengan lampu budaya yang merupakan desain tahun 1980-an. Bisa dibayangkan kalau pohonnya rindang dan suasananya sejuk sangat nikmat," urainya.

Demikian halnya dengan PKL akan menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta untuk menatanya. Untuk kantong parkir akan diatur di dekat Malioboro, seperti Jalan Bhayangkara dan Mataram. (ais)

Negara Harus Konsisten Dengan Pelestarian

KOORDINATOR Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Jhohannes Marbun, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menata kawasan Malioboro sebagai kawasan cagar budaya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan

pihaknya kepada Pemkot Yogyakarta maupun Pemda DIY sejak tahun 2012, yaitu membuka 'topeng' Malioboro, dan juga menata kembali Malioboro dengan acuannya sebagai

● ke halaman 19

Negara Harus

● Sambungan Hal 13

kawasan cagar budaya. "Topeng itu maksudnya iklan di depan bangunan," ucapnya, kemarin.

Namun demikian, Madya, mengharapkan Pemda DIY konsisten dengan komitmennya tentang pelestarian cagar budaya untuk jangka panjang, dengan tetap melakukan pengawasan melekat terhadap kawasan tersebut. Baik undang-undang maupun Perda DIY tentang Pelestarian Cagar Budaya sudah mengatur perlunya lembaga yang mengelola kawasan cagar budaya.

Salah satu kendalanya, lanjut Jho, harus mengomunikasikan kepada masya-

rakat pemilik di kawasan Malioboro dan dibutuhkan kesadaran bersama. Secara teknis, dalam konteks pelestarian cagar budaya, maka pemerintah harus memiliki kondisi bangunan asli itu seperti apa, lalu kondisi eksistennya saat ini bagaimana.

"Syarat pelestarian cagar budaya, ya, kita harus tahu kondisi bangunan asli sebelumnya bagaimana, termasuk bahan-bahannya. Lalu ketika berbicara penyelarasan, tentu kita mesti hati-hati bangunan mana saja yang harus diselaraskan atau diadaptasi? Karena ini dimungkinkan terkait erat dengan kondisi bangunan masa lalu, yang antar bangunannya belum tentu selaras," urai Jho. Sejatinnya, papar dia, pe-

nataan cagar budaya menjadi nafas pariwisata di banyak negara lain. Sesungguhnya sumber daya manusia (SDM) di DIY itu sangat komplet, permasalahannya adalah bagaimana melibatkan SDM-SDM yang mumpuni tersebut dan menyamakan visi mereka bahwa sentral penataan Malioboro bertitik tolak pada pelestarian kawasan cagar budaya. Sehingga setiap potensi SDM yang ada mengacu pada visi tersebut dan tidak mengedepankan ego masing-masing keahlian, tapi justru tantangan masing-masing ahli memiliki perspektif pelestarian cagar budaya.

"Apabila ini berhasil, maka ini menjadi contoh bagi siapa pun di republik ini, bahwa kolaborasi itu sangat mung-

kin. Bukan sebaliknya, apabila tidak menyukai bangunan cagar budaya tersebut, lalu dihancurkan. Ini yang masih terjadi di republik ini terkait perlakuannya terhadap cagar budaya," jelas Jho.

Tak bisa dimungkiri, konsep modernisasi kerap berseberangan dengan semangat pelestarian. Menurut Jho, ini tantangan bagi pemerintah soal seberapa konsisten mewujudkan cita-cita republik.

"Ini menjadi penting dalam penataan Malioboro. Siapa yang mengawasi? Siapa pula yang mengelola sebagaimana diatur UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya, di mana diperlukan pengelola suatu kawasan cagar budaya," pungkas Jho. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005